



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEGUH BUDIONO
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA
3. NHK : 511052

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 637.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/45 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30160 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 261.000.000
3. Tanah Seluas 1050 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 160.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 239.300.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA/VELOZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR150 R Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 19.800.000
3. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 984.400.000

**III. HUTANG**

Rp. 419.533.460

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 564.866.540

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.